

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

QS. al-Maidah Ayat 49

Buku:

A.A. Andi Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Putra Media Nusantara. Surabaya.

A. Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

A. Khisni. 2017. *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam*. Unissula Press. Semarang.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. UII Press. Yogyakarta.

Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Hamzah. 2017. *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Anke Dwi Saputro. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. FH-UII Press. Yogyakarta.

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.

- Fathurramhan. 1998. *Dasar-Dasar Fikih Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Juni Sjafrien Jahja. 2013. *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi*. Visimedia. Jakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Jual Beli*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muardi Chatib. *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*. Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB. Mataram.
- Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya.
- R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- R. Wiryo. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara – Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung.

Soegianto. 2015. *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*. Farisma Indonesia. Yogyakarta.

Soerjono Soekamto. 1997. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Tim Sosio Prawara Cendekia. 2012. *Akuntansi*. Sewu. Bandung.

Tb. Irman S.. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. MQS Publishing. Bandung.

Yunus Husein dan Roberts K.. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rajawali Pers. Depok.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal:

A, Hamid S Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*. Disertasi Ilmu Hukum. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

Tomy Herlix. 2016. *Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya*. Jurnal Univeristas Islam Indonesia. Yogyakarta. Diakses di -----
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y> pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, pukul 17.00 WIB.

Rahilatul Jannah. 2013. *Pencucian Uang dalam Perspektif Islam*. Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari. Banjarmasin. Diakses di <idr.uin-antasari.ac.id/2463/2/BAB%20IV.pdf> pada hari Senin, 26 Nopember 2018, pukul 16.30 WIB.

Neni Sri Imaniyanti. 2005. *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*. Jurnal Mimbar Volume 21 Nomor 1 Universitas Islam Bandung. Bandung. Diakses di <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/166/pdf> pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, pukul 15.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER-04/1.02/PPATK/03/2014

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Internet:

<https://ini.id/post/pendaftaran-aplikasi-grips-di-ppatk> pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, pukul 20.30 WIB.

<http://jateng.tribunnews.com/2018/07/23/kota-semarang-peringkat-pertama-dugaan-lktm-di-jawa-tengah> pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 18.00 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, Pukul 7.25 WIB.

<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-transaksi-keuangan-atau-bisnis/3556> pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, pukul 10.00 WIB.

Panduan Registrasi dan Instalasi GRIPS, diakses di <http://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/60/panduan-registrasi-dan->

instalasi-grips.html pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2018, pukul 02.00 WIB

PPATK. *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Bagian 3: Pendanaan Terorisme)*. Diakses di <http://elearning/ppatk.go.id> pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2019, pukul 15.00 WIB

PPATK, *Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya (Bagian 3: Identifikasi, Verifikasi dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa)*. Diakses di <http://elearning/ppatk.go.id> pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019, pukul 17.00 WIB

PPATK. *Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*. Diakses di <http://elearning/ppatk.go.id> pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB.